

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang meningkat disertai adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi sehingga berdampak terhadap meningkatnya migrasi penduduk dari desa ke kota (terutama di kota-kota besar). Hal tersebut membutuhkan penambahan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kehidupan serta sistem kebutuhan lainnya seperti alat perhubungan (alat transportasi). Alat transportasi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan manusia. Perkembangan sarana transportasi berdasarkan pada penemuan-penemuan teknologi baru, sangat berguna dan bisa digunakan. Namun pencapaian sasaran pembangunan telah menimbulkan permasalahan di bidang transportasi di perkotaan. Sistem transportasi publik merupakan salah satu solusi untuk menjawab masalah-masalah transportasi di daerah-daerah perkotaan.

Perkembangan transportasi publik di Indonesia yang lambat, memberi banyak hambatan pada masyarakat, sehingga tidak memilih transportasi publik pada pilihan pertama untuk bepergian. Masalah-masalah transportasi tersebut harus ditangani, dengan upaya penyedia transportasi menentukan prioritas dari kualitas pelayanan transportasi publik yang sudah ada. Penentuan prioritas sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu untuk menemukan faktor dari kualitas pelayanan yang paling berpengaruh. Penentuan prioritas merupakan hal yang penting, karena kemampuan pemerintah untuk mengembangkan transportasi umum dibatasi oleh keterbatasan waktu, uang, dan sumber daya manusia. Pengukuran tingkatan pelayanan yang ditawarkan, merupakan hal yang penting dalam mengidentifikasi aspek pelayanan yang potensial beserta kelemahannya, apabila dibandingkan dengan modal transportasi lainnya. Pelayanan dan pembangunan sektor transportasi perkotaan memiliki aspek yang cukup luas, meliputi tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan terhadap masyarakat, transportasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, sarana angkutan umum dan sarana angkutan pribadi. Angkutan umum merupakan sektor penunjang utama terhadap mobilisasi penduduk perkotaan, dan sarana penunjang pengalokasian barang dan jasa yang

merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan perkotaan. Selain itu, kepentingan perekonomian angkutan umum juga diperlukan untuk tujuan sosial seperti bekerja, sekolah, berbelanja dan lainnya.

Jember merupakan kota berkembang, yang memiliki banyak sekali potensi ekonomi, mulai dari pendidikan, niaga, dan wisata. Besarnya potensi ekonomi tersebut, kurang diimbangi dengan pelayanan sistem transportasi yang memadai, karena kinerja angkutan umum perkotaan Jember yang cenderung menurun. Menurunnya kinerja angkutan umum perkotaan Jember tidak terlepas dari faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti, kondisi kurang nyaman dalam segi pelayanan, mobil angkutan umum yang sudah berumur tua dan belum dilakukan perbaikan jaringan trayek oleh pihak berwenang, dan banyak terjadi penyimpangan angkutan umum. Faktor-faktor tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelayanan yang baik seperti sistem transportasi. Sistem transportasi kota merupakan komponen yang perannya sangat signifikan, karena kondisi sistem angkutan umum yang buruk akan menyebabkan turunnya efektifitas maupun efisiensi angkutan umum itu sendiri. Sampai saat ini terdapat lebih dari 100 (seratus) trayek angkutan dalam kota yang melintasi sebagian besar wilayah Kota Jember. Kota Jember memiliki 4 terminal trayek yang masih beroperasi, dan semua jalur tersebut sudah sesuai. Namun, terdapat terminal yang dibekukan salah satunya yaitu terminal ajung, karena melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan angkutan umum tidak melewati area tersebut. Terminal-terminal yang masih aktif dalam jaringan trayek antara lain: Tawang Alun, Ajung, Pakusari, dan Arjasa. Pemerintah Kabupaten Jember berusaha mewujudkan pelayanan penyedia fasilitas sarana prasarana transportasi angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dinas Perhubungan menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat melalui pelayanan transportasi yang aman, cepat, murah dan nyaman. Angkutan umum di Kabupaten Jember bersifat massal, sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan angkutan umum, menyebabkan biaya tumpang ditekan serendah mungkin. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab atas

penyelenggaraan angkutan umum baik dengan jumlah penumpang banyak ataupun sedikit.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berupaya menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan penataan jaringan trayek angkutan umum Perkotaan Jember sangat penting, untuk meningkatkan pelayanan dan kuantitas pengguna angkutan umum. Tinjauan serta pengawasan terhadap jaringan trayek perlu dilakukan agar dapat diidentifikasi permasalahannya khususnya pada angkutan perkotaan. Hal tersebut tentunya menjadi harapan masyarakat agar setiap kegiatan transportasi terlayani secara maksimal di wilayah perkotaan Jember. Masyarakat kota menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan pada daerah-daerah tertentu, sehingga dapat menimbulkan masalah transportasi pada trayek. Salah satu cara menurunkan tingkat penggunaan kendaraan pribadi yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan angkutan umum, sehingga pemakai kendaraan pribadi berkenan menggunakan jasa angkutan umum kota. Pada kegiatan optimalisasi, fungsi sarana dan prasarana transportasi harus memiliki tingkat manfaat yang baik bagi seluruh jaringan jalan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, penyesuaian diperlukan oleh jaringan trayek di kawasan pusat kegiatan yang berada dalam wilayah kota Kabupaten Jember. Pelayanan jasa angkutan penumpang umum seharusnya lebih berkualitas dan merata terhadap trayek, dan perlu mengatur dan menetapkan Penyesuaian Jaringan Trayek di Kabupaten Jember. Apakah Kebijakan Penyesuaian Jaringan Trayek di Kabupaten Jember telah tepat guna dan mampu memecahkan masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penyesuaian jaringan trayek di Kabupaten Jember. Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Peraturan

Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah mengevaluasi kebijakan Peraturan Bupati Jember nomor 13 tahun 2013 tentang Penyesuaian Jaringan Trayek di Wilayah Kota Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi masukan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengenai Evaluasi Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Jaringan Trayek.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Pada segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan bidang kajian Evaluasi Kebijakan khususnya mengenai penataan jaringan trayek Angkutan umum Perkotaan dan kebijakan penyediaan sarana transportasi umum.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. Di bawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.